

## UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DALAM MENANGGULANGI ANAK PUTUS SEKOLAH

Oleh: Sadiyah dan Suripno, S.H., M.Pd/Pendidikan Kewarganegaraan dan  
Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

[sdiah12@yahoo.com](mailto:sdiah12@yahoo.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menanggulangi anak putus sekolah. Selain itu bertujuan untuk mengetahui hambatan yang ditemui Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menanggulangi anak putus sekolah.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen. Subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive*. Subjek penelitian terdiri dari 7 orang yaitu 2 orang dari DIKPORA dan 5 orang dari DISNAKERTRANSOS. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *cross check*. Analisis data secara induktif yang langkahnya meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: (1) upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menanggulangi anak putus sekolah dilakukan melalui, a) upaya preventif, meliputi pemberian bantuan beasiswa siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK dari keluarga kurang mampu; melaksanakan Program Keluarga Harapan; b) upaya kuratif, meliputi pelaksanaan Program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan; c) upaya pembinaan, meliputi pelaksanaan kegiatan peningkatan keterampilan bagi anak putus sekolah luar balai sosial, kegiatan pendidikan kemasyarakatan; memberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi anak terlantar luar panti; mengirimkan anak putus sekolah ke Balai Rehabilitasi Sosial Anak “Dharma Putera” Purworejo dan Panti Sosial Marsudi Putera “Antasena” Magelang. (2) Hambatan yang ditemui Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menanggulangi anak putus sekolah diantaranya adalah, a) hambatan internal, yaitu hambatan yang berasal dari pemerintah selaku subjek pelaksana yang berwujud; hambatan fisik yaitu terkait dengan adanya keterbatasan teknologi, hambatan organisasional yaitu terkait dengan mekanisme internal organisasi yang membatasi upaya yang dilakukan, hambatan distributif yaitu terkait pertentangan antara tuntutan efisiensi dengan tuntutan keadilan, dan hambatan anggaran yaitu terkait dengan keterbatasan anggaran; b) hambatan eksternal yaitu hambatan yang berasal dari luar pemerintah selaku subjek pelaksana seperti berasal dari anak putus sekolah dan orangtua.

**Kata kunci :** Upaya, Pemerintah Kabupaten Kebumen, Menanggulangi, Anak Putus Sekolah

## **THE EFFORTS OF KEBUMEN GOVERNMENT IN COPING WITH SCHOOL DROPOUTS**

By: Sadiyah and Suripno, S.H.,M.Pd/Legal and Civic Education Department,  
Faculty of Social Sciences, Yogyakarta State University

[sdiah12@yahoo.com](mailto:sdiah12@yahoo.com)

### **ABSTRACT**

This research is aimed to describe the efforts of Kebumen Government in coping with school dropouts and to identify obstacles that Kebumen Government faces in coping with school dropouts.

It is descriptive-qualitative research. This research was done in Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga and Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial, Kebumen. The research subjects were determined using purposive technique. The research subjects consisted of 7 people, 2 people from DIKPORA and 5 people from DISNAKERTRANSOS. The data were collected by conducting interviews and document study. The data analysis was carried out inductively that the steps covered data reduction, data presentation, and conclusion.

The results of the research showed that: (1) the efforts of Kebumen Government in coping with school dropouts were conducted by, a) preventive efforts, including scholarship giving to students of SD/ MI, SMP/ MTs, and SMA/ MA, SMK from poor families; conducting Program Keluarga Harapan; b) curative efforts, including the implementation of Program Pengurangan Pekerja Anak in order to support Program Keluarga Harapan; c) development efforts, including the implementation of skill development activities for school dropouts, social education activities; giving Usaha Ekonomi Produktif supports for waifs; sending school dropouts to Balai Rehabilitasi Sosial Anak "Dharma Putera" Purworejo and Panti Sosial Marsudi Putera "Antasena" Magelang. (2) Obstacles that Kebumen Government in coping with school dropouts were, a) internal obstacles, such as obstacles from the government as the implementer, that were in the form of; physical obstacles were related to the limited technology, organizational obstacles were related to internal mechanism of an organization that limits the efforts, distributive obstacles were related to the contradiction between efficiency and justice demands, and budgetary obstacles were related to the limited budget b) external obstacles were obstacles from outside of the government as the implementer, such as from school dropouts or their parents

**Keywords:** Efforts, Kebumen Government, cope with, school dropouts

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Untuk kepentingan itu maka negara bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan. Dalam menyelenggarakan pendidikan nasional, yang pertama bertanggungjawab adalah pemerintah, baru kemudian keluarga dan masyarakat sebagai mitranya (Cholisin, 2004: 140). Pemerintah dalam rangka menjalankan tugas negara yang berupa mencerdaskan kehidupan bangsa, memenuhi hak warga negara di bidang pendidikan, mewujudkan kepribadian nasional, dilaksanakannya melalui pendidikan sekolah (pendidikan formal) maupun nonformal (Cholisin, 2000).

Di negara Indonesia, hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan salah satu hak dasar warga negara (*citizen's right*) yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, wajar jika pemerintah melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional telah mencanangkan Wajib Belajar 9 Tahun. Bahkan untuk meminimalisir jumlah angka putus sekolah dan agar seluruh warga usia sekolah berkesempatan untuk menikmati pendidikan sampai minimal jenjang pendidikan menengah, pemerintah menyelenggarakan Pendidikan Menengah Universal atau yang juga dikenal dengan sebutan Wajib Belajar 12 Tahun (Agung Laksono, 2013: 28).

Pada tahun 2012 UNICEF merilis laporan tahunan Indonesia. Dari laporan tersebut diketahui bahwa di bidang pendidikan, masih ada sekitar 2,3 juta anak usia 7-15 tahun yang tidak bersekolah. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan

Jawa Barat, dimana terdapat sebagian besar penduduk Indonesia, ada 42% anak putus sekolah.

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah provinsi Jawa Tengah yang berdasarkan lansiran [www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com) tanggal 28 September 2015 diketahui bahwa Kabupaten Kebumen merupakan kabupaten dengan jumlah angka kemiskinan tertinggi kedua di Jawa Tengah yaitu mencapai 21,32 persen (Wonosobo, Kabupaten Termiskin di Jawa Tengah: <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/09/28/344099/wonosobo-kabupaten-termiskin-di-jawa-tengah> diakses 29 Februari 2016). Masalah anak putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi dan sosial keluarganya, kemudian si anak harus bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, merupakan salah satu dari 26 jenis masalah sosial yang masih banyak terdapat di tengah masyarakat Kebumen (Anak Putus Sekolah Problem Sosial Kebumen: <http://krjogja.com/read/251281/anak-putus-sekolah-problem-sosialkebumen>. [kr](http://krjogja.com/read/251281/anak-putus-sekolah-problem-sosialkebumen) diakses 15 November 2015). Berdasarkan Profil Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2014/2015 sendiri diketahui bahwa di Kabupaten Kebumen masih terdapat anak putus sekolah. Anak putus sekolah di Kabupaten Kebumen pada tahun 2014/2015 adalah berjumlah 544 anak, baik dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK.

Jika dibandingkan dengan putus sekolah rata-rata provinsi Jawa Tengah maka putus sekolah Kabupaten Kebumen pada jenjang tertentu adalah lebih tinggi. Hal tersebut terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013**

| No. | Tahun  | SD/ MI (%)    |               | SMP/ MTs (%) |               | SMA/ MA/ SMK (%) |              |
|-----|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
|     |        | Kab.          | Prov.         | Kab.         | Prov.         | Kab.             | Prov.        |
| 1.  | 2010*  | 119,63        | 108           | 102,45       | 99,40         | 69,17            | 64.62        |
| 2.  | 2011*  | 109.26        | 114.93        | 101.84       | 99.72         | 62.04            | 64.93        |
| 3.  | 2012*  | <b>108,78</b> | <b>109,06</b> | 104.36       | 100.50        | <b>65.97</b>     | <b>67.00</b> |
| 4.  | 2013** | 111,58        | 109,08        | <b>99,82</b> | <b>100,52</b> | <b>65,97</b>     | <b>70,01</b> |

Sumber: \*Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

\*\*Buku Informasi Singkat Pembangunan Pendidikan di Jawa Tengah Tahun 2014

Lebih rendahnya APK Kabupaten Kebumen dibanding APK Provinsi Jawa Tengah seperti yang terlihat pada tabel di atas mengindikasikan bahwa di Kabupaten Kebumen penduduk yang tidak bersekolah jumlahnya lebih banyak dibanding jumlah rata-rata penduduk tiap Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang tidak bersekolah.

Berdasarkan data Indikator Kesejahteraan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang disusun dan diterbitkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2011, diketahui bahwa Kabupaten Kebumen merupakan wilayah prioritas pertama dalam kabupaten/kota prioritas untuk dilakukan intervensi dalam penurunan angka putus sekolah penduduk usia 7-15 tahun dan kabupaten/kota prioritas untuk dilakukan intervensi dalam peningkatan angka partisipasi murni jenjang pendidikan menengah pertama. Dalam kabupaten/kota prioritas untuk dilakukan intervensi dalam peningkatan angka partisipasi murni jenjang pendidikan sekolah dasar (SD/MI) Kabupaten Kebumen

menempati prioritas kedua. Prioritas pertama yaitu wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan angka putus sekolah tinggi.

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan nasional pihak yang pertama bertanggungjawab adalah pemerintah, Pemerintah Kabupaten Kebumen selaku penyelenggara tugas dan kewenangan negara di tingkat kabupaten tidak tinggal diam melihat permasalahan anak putus sekolah. Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah melakukan upaya-upaya. Upaya tersebut salah satunya yaitu melalui pelibatan instansi-instansi yang ada seperti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) serta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (DISNAKERTRANSOS) Kabupaten Kebumen selaku instansi yang berkompeten untuk melakukan upaya penanggulangan anak putus sekolah.

Meskipun sudah ada upaya, akan tetapi belum diketahui secara jelas bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menanggulangi anak putus sekolah. Bertalian dengan hal tersebut, maka perlu diteliti bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menanggulangi anak putus sekolah.

Selain itu, meskipun upaya untuk menanggulangi anak putus sekolah telah dilakukan akan tetapi dari data yang telah disampaikan sebelumnya diketahui bahwa masalah anak putus sekolah masih banyak terjadi. Oleh karena itu, penulis juga tergerak untuk meneliti tentang hambatan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menanggulangi anak putus sekolah mengingat belum diketahuinya hambatan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menanggulangi anak putus sekolah.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, karena menggambarkan keadaan suatu lembaga yakni pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menanggulangi anak putus sekolah. Menurut Lexy J. Moleong (2012: 6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sesuai dengan dasar tersebut, maka penelitian deskriptif kualitatif diharapkan mampu memberikan gambaran tentang upaya pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menanggulangi anak putus sekolah beserta hambatanya.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) serta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (DISNAKERTRANSOS) Kabupaten Kebumen. Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan yaitu mulai bulan Desember 2015 sampai dengan Februari 2016.

Subjek penelitian dalam penelitian ini diambil secara *purposive* yaitu berupa teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria atau pertimbangan tertentu yang dimaksud yaitu pemegang jabatan atau orang-orang yang karena posisinya (di DIKPORA dan/atau DISNAKERTRANSOS) mempunyai kewenangan, pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai upaya pemerintah

Kabupaten Kebumen dalam menanggulangi anak putus sekolah beserta hambatannya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *cross check*, yang dilakukan dengan mengecek data hasil wawancara setiap subjek penelitian dengan data yang diperoleh dari dokumentasi. Agar keabsahan data terjamin akurat dan telah sesuai dengan data-data yang ada, maka *cross check* juga dilakukan terhadap subjek penelitian yang satu dengan subjek penelitian yang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah teknik analisis induktif melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Menanggulangi Anak Putus Sekolah**

Upaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu langkah riil atau tindakan nyata, dan bersifat teknis sebagai penjabaran dari strategi (dalam hal ini adalah program/kegiatan), yang dilakukan pada tahun 2015. Sedangkan penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup segi preventif, kuratif, dan pembinaan.

Pemerintah Kabupaten Kebumen, dalam hal ini adalah DIKPORA dan DISNAKERTRANSOS selaku bagian dari Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen telah melakukan sejumlah upaya untuk menanggulangi anak putus sekolah. Upaya-upaya tersebut yaitu:



a. Upaya preventif

Upaya preventif adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan terarah, untuk menjaga agar masalah anak putus sekolah tidak muncul ke masyarakat. Wujud upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah anak putus sekolah yaitu meliputi pemberian bantuan beasiswa siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK dari keluarga kurang mampu (BOSDA) serta melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH).

b. Upaya kuratif

Upaya kuratif adalah upaya yang dilakukan sebagai wujud antisipasi supaya masalah anak putus sekolah itu tidak meluas dan merugikan masyarakat sekitarnya. Upaya kuratif dilakukan dalam menghadapi permasalahan anak putus sekolah dengan harapan adanya upaya tersebut dapat mengembalikan anak putus sekolah ke jalur pendidikan formal maupun nonformal. Wujud upaya kuratif yang dilakukan yaitu melaksanakan Program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH).

c. Upaya pembinaan

Upaya pembinaan adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi akibat dari anak putus sekolah. Akibat tersebut misalnya kurang dimilikinya keterampilan atau pengetahuan karena pendidikan yang rendah, terjadinya kenakalan remaja, kesejahteraan hidup anak kurang dan lain-lain. Upaya pembinaan yang dimaksud di sini hanya mencakup

pembinaan setelah seorang anak putus sekolah, tidak termasuk pembinaan untuk mencegah anak putus sekolah. Upaya tersebut yaitu meliputi pelaksanaan kegiatan peningkatan keterampilan bagi anak putus sekolah luar balai sosial, kegiatan pendidikan kemasyarakatan; memberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi anak terlantar luar panti; serta mengirimkan anak putus sekolah ke Balai Rehabilitasi Sosial Anak “Dharma Putera” Purworejo dan Panti Sosial Marsudi Putera “Antasena” Magelang.

Dari keseluruhan upaya yang dilakukan hanya ada 2 program/kegiatan yang benar-benar berasal dari pemerintah Kabupaten Kebumen yaitu pemberian bantuan beasiswa siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK dari keluarga kurang mampu (BOSDA) serta pemberian bantuan UEP bagi anak terlantar luar panti (dalam wujud pemberian bantuan kambing untuk ditenak). Untuk upaya-upaya lain yang dilakukan hanya merupakan wujud dukungan pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap program/kegiatan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Jawa Tengah. Misalnya, PKH dan PPA-PKH sejatinya merupakan program dari pemerintah pusat; kegiatan peningkatan keterampilan bagi anak putus sekolah luar balai sosial, kegiatan pendidikan kemasyarakatan sejatinya merupakan kegiatan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; Balai Rehabilitasi Sosial Anak “Dharma Putera” Purworejo sejatinya merupakan balai rehabilitasi sosial yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Jawa Tengah, sedangkan Panti Sosial Marsudi Putera

“Antasena” Magelang berada di bawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

## **2. Hambatan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Menanggulangi Anak Putus Sekolah**

### **a. Hambatan internal**

Hambatan internal berasal dari pemerintah selaku subjek pelaksana. Hambatan yang dialami berupa:

#### **1) Hambatan fisik.**

Yaitu hambatan yang terjadi jika pencapaian tujuan atau sasaran dihalangi oleh adanya keterbatasan pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini hambatan fisik yang muncul berupa lokasi calon penerima PKH yang sulit dijangkau (sulitnya medan) ketika proses validasi dan kendaraan pribadi yang digunakan oleh pendamping terkadang rusak ketika ada laporan.

#### **2) Hambatan organisasional**

Yaitu hambatan yang terjadi dalam hal mekanisme internal organisasi membatasi upaya untuk mengatasi. Dalam hal ini hambatan organisasional yang muncul yaitu berupa belum terintegrasinya penanganan putus sekolah antar SKPD pada pemberian bantuan beasiswa siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK dari keluarga kurang mampu; *deadline* pelaporan yang mendadak pada PKH; adanya pelaksana PKH yang *doublejob*; serta kurang validnya data TNP2K yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan, sehingga pendamping mengalami kesulitan dalam

merekrut peserta penerima manfaat yang sesuai dengan data TNP2K tersebut pada PPA-PKH.

3) Hambatan distributif

Yaitu hambatan yang biasanya terjadi sebagai pertentangan antara tuntutan efisiensi dengan tuntutan keadilan. Hambatan distributif yang muncul berupa lokasi atau medan tempat anak putus sekolah tinggal sulit dijangkau pada saat rekrutmen calon penerima manfaat PPA-PKH; lokasi pelaksanaan kegiatan peningkatan keterampilan bagi anak putus sekolah luar balai sosial yang agak jauh dari alamat peserta sehingga sebagian peserta datang terlambat; serta susahny mencari anak putus sekolah selaku calon penerima manfaat Balai Rehabilitasi Sosial Anak “Dharma Putera” Purworejo dan Panti Sosial Marsudi Putera “Antasena” Magelang.

4) Hambatan anggaran

Yaitu hambatan yang sangat wajar dan berkaitan dengan keterbatasan anggaran. Dalam pelaksanaan PKH hambatan anggaran muncul berupa dana pendampingan untuk kegiatan operasional terbatas. Dalam PPA-PKH hambatan yang muncul berupa pelaksanaan kegiatan pendampingan di shelter pendamping memerlukan biaya operasional untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan termasuk pengeluaran biaya yang tak terduga seperti biaya seremonial pembukaan maupun penutupan kegiatan shelter yang tidak teranggarkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan PPA-PKH

Pusat; keterlambatan turunnya dana PPA-PKH sehingga dalam pelaksanaannya harus ditutup dengan dana lain terlebih dahulu sebelum dana PPA-PKH turun; dalam pengembalian anak kependidikan banyak pekerja anak dan orang tua mengeluh bagaimana dengan operasional anak selama mengikuti pendidikan karena banyak sekali biaya-biaya untuk menunjang pendidikan seperti uang saku, uang transport anak ke sekolah, biaya pembelian seragam dan lain-lain; serta keterlambatan pencairan dana dari Kementerian Ketenagakerjaan khususnya untuk biaya transportasi anak sehingga keperluan biaya untuk pendaftaran ulang masuk sekolah dan perlengkapan sekolah tidak dapat dipenuhi. Dalam hal pemberian UEP hambatan yang muncul berupa terbatasnya anggaran karena sumber dana dalam kegiatan ini berasal dari APBD Kabupaten Kebumen.

b. Hambatan eksternal

Hambatan eksternal mengacu pada hambatan yang berasal dari luar pemerintah selaku subjek pelaksana seperti berasal dari anak putus sekolah maupun dari orangtua anak putus sekolah.

1) Berasal dari anak putus sekolah

Dalam pelaksanaan pendampingan dan pasca pendampingan PPA-PKH, hambatan yang berasal dari anak putus sekolah muncul dalam bentuk:

- a) Pada minggu pertama pekerja anak penerima manfaat PPA-PKH masuk shelter, sebagian anak tidak betah tinggal di shelter dengan alasan antara lain pusing, batuk, flu, gatal-gatal, dan tidak terbiasa dengan fasilitas shelter yang berbeda dengan rumahnya.
  - b) Pekerja anak rindu dengan orangtua sehingga berkeinginan untuk pulang.
  - c) Masih terdapat anak putus sekolah yang tetap tidak berniat untuk melanjutkan sekolah karena berbagai macam alasan.
- 2) Berasal dari orangtua anak putus sekolah

Hambatan yang berasal dari orangtua anak putus sekolah muncul dalam pelaksanaan pendampingan dan pasca pendampingan PPA-PKH. Hambatan yang berasal dari orangtua anak putus sekolah muncul dalam hal ketika pekerja anak rindu dengan orangtua sehingga berkeinginan untuk pulang, orangtua anak menginginkan anaknya untuk dipulangkan dengan alasan khawatir terhadap anaknya di shelter.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menanggulangi masalah anak putus sekolah pada tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah melakukan sejumlah upaya, yaitu:

1. Upaya preventif

Yaitu program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mencegah anak putus sekolah meliputi pemberian bantuan beasiswa siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK dari keluarga kurang mampu; serta melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH).

2. Upaya kuratif

Yaitu program/kegiatan yang dilaksanakan untuk menghadapi anak putus sekolah supaya anak putus sekolah tidak meluas meliputi pelaksanaan Program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH).

3. Upaya pembinaan

Yaitu program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi akibat dari anak putus sekolah meliputi pelaksanaan kegiatan peningkatan keterampilan bagi anak putus sekolah luar balai sosial, kegiatan pendidikan kemasyarakatan; memberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi anak terlantar luar panti; serta mengirimkan anak putus sekolah ke Balai Rehabilitasi Sosial Anak “Dharma Putera” Purworejo dan Panti Sosial Marsudi Putera “Antasena” Magelang.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menanggulangi anak putus sekolah sudah cukup baik dengan melihat bahwa upaya yang dilakukan sudah mencakup 3 segi yaitu preventif, kuratif dan pembinaan. Meskipun sudah mencakup 3 segi, upaya-upaya yang dilakukan dinilai belum terlalu baik atau hanya cukup baik karena dalam pelaksanaannya

secara teknis di lapangan dinilai masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan di dalamnya. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya yaitu:

1. Hambatan internal

Yaitu hambatan yang berasal dari pemerintah selaku subjek pelaksana yang berwujud:

a. Hambatan fisik

Muncul karena pencapaian tujuan atau sasaran dari program/kegiatan dihalangi oleh adanya keterbatasan teknologi.

b. Hambatan organisasional

Muncul dalam hal mekanisme internal organisasi membatasi upaya untuk mengatasi.

c. Hambatan distributif

Terjadi sebagai pertentangan antara tuntutan efisiensi dengan tuntutan keadilan.

d. Hambatan anggaran

Berkaitan dengan keterbatasan anggaran.

2. Hambatan eksternal

Yaitu hambatan yang berasal dari luar pemerintah selaku subjek pelaksana, seperti:

a. Berasal dari anak putus sekolah

b. Berasal dari orang tua anak putus sekolah



## Saran

Berdasarkan gambaran penelitian yang telah dilakukan dengan segala kekurangan, maka penulis mencoba untuk memberikan saran-saran kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen guna menanggulangi anak putus sekolah yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penanggulangan anak putus sekolah dilaksanakan secara menyeluruh ke tiap-tiap desa ataupun kecamatan yang berada di Kabupaten Kebumen.
2. Membuat sebuah program/kegiatan baru yang murni inisiatif daerah untuk menekan angka putus sekolah.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar SKPD maupun dengan unsur-unsur pemerintahan yang lain baik eksekutif maupun legislatif dalam menanggulangi permasalahan anak putus sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung Laksono. (2013). *Menuju Indonesia Emas*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Cholisin. (2000). *IKN – PKN*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Cholisin. (2004). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2014). *Informasi Singkat Pembangunan Pendidikan di Jawa Tengah Tahun 2014*. Jawa Tengah: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen. (2015). *Profil Pendidikan*. Kebumen: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Lexy J. Moleong. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2011). *Indikator Kesejahteraan Daerah Provinsi Jawa Tengah*. Jakarta Pusat: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

UNICEF. (2012). *Indonesia: Laporan Tahunan 2012*. Jakarta: UNICEF.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dwi. (2015). “Anak Putus Sekolah Problem Sosial Kebumen”. <http://krjogja.com/read/251281/anak-putus-sekolah-problem-sosial-kebumen.kr>. Diakses pada tanggal 15 November 2015.

Eviyanti. (2015). “Wonosobo, Kabupaten Termiskin di Jawa Tengah”. <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/09/28/344099/wonosobo-kabupaten-termiskin-di-jawa-tengah>. Diakses pada tanggal 29 Februari 2016.